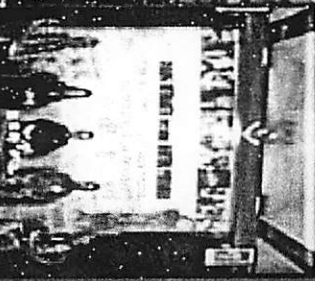
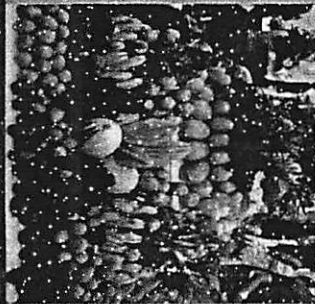
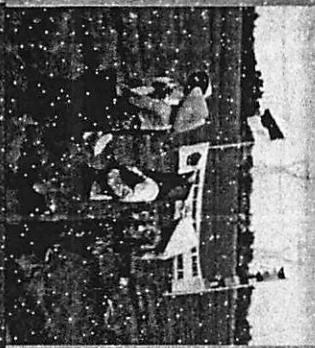




KEMENTERIAN PERTANIAN

“Peningkatan
Kualitas Hasil
Pertanian
dan Perikanan
Agar Lebih
Mudah
Dijangkau
dan
Dijadikan
Sumber
Penghidupan
Masyarakat
di Indonesia”

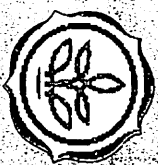


LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN TAHUN 2010

ASAS PENYULUHAN PERTANIAN



BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
JAKARTA - 2011



KEMENTERIAN PERTANIAN

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
TAHUN 2010**

**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
JAKARTA - 2011**



RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Permentan Nomor: 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, tugas Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) adalah melaksanakan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan fungsi-fungsi: (a) penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standardisasi dan sertifikasi SDM pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (b) pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standardisasi dan sertifikasi SDM pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (c) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standardisasi dan sertifikasi SDM pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan (d) pelaksanaan administrasi BPPSDMP. Pelaksanaan tugas dan fungsi BPPSDMP di Pusat, didukung oleh empat unit kerja Eselon II, yaitu: (1) Pusat Penyuluhan Pertanian; (2) Pusat Pelatihan Pertanian; (3) Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian; serta (4) Sekretariat BPPSDMP. Di tingkat operasional lapangan, BPPSDMP didukung oleh 19 UPT (20 Satker), 35 Satker Dekonsentrasi (Bakorluh/Dinas Lingkup pertanian Provinsi), dan 73 Satker Tugas Pembantuan (Bapelluh/Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota).

Selaras dengan visi Kementerian pertanian, visi BPPSDMP tahun 2010-2014 adalah: terwujudnya sumberdaya manusia pertanian yang profesional, kreatif, inovatif dan berwawasan global dalam rangka meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah, ekspor dan kesejahteraan petani. Untuk mewujudkan visi tersebut, BPPSDMP menetapkan empat misi, yaitu: (1) mengembangkan sistem penyuluhan pertanian yang komprehensif dan terpadu; (2) mengembangkan sistem pelatihan pertanian yang berbasis kompetensi kerja; (3) mengembangkan pendidikan, standardisasi dan sertifikasi profesi SDM pertanian yang kredibel; serta (4) mengembangkan sistem administrasi manajemen yang transparan dan akuntabel. Sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka tujuan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian pada 5 tahun kedepan adalah: (1) meningkatkan kompetensi dan kemandirian petani dalam rangka peningkatan produktivitas petani, usahatani dan pendapatan petani; (2) meningkatkan kompetensi kerja aparatur dan non-aparatur pertanian; (3) menghasilkan aparatur dan non-aparatur yang kompeten serta sistem standarisasi dan sertifikasi profesi SDM pertanian yang kredibel; serta (4) meningkatkan pelayanan dan tata kelola administrasi dan manajemen yang efektif dan efisien. Selanjutnya sasaran strategis yang ingin dicapai BPPSDMP pada tahun 2010-2014 adalah: (1) meningkatnya kompetensi aparatur pertanian; (2) meningkatnya kapasitas non-aparatur pertanian; (3) bertumbuhkembangnya kelembagaan petani; dan (4) meningkatnya kepuasan pelayanan birokrasi serta tersusunnya laporan kinerja dan keuangan yang akuntabel dan berstatus wajar tanpa pengecualian (WTP).

Pada tahun 2010, pencapaian sasaran strategis BPPSDMP diukur dari 70 indikator kinerja dibawah payung 4 program, yaitu: (1) peningkatan kesejahteraan petani; (2) penerapan pemerintahan yang baik; (3) pendidikan menengah; dan (4) pendidikan tinggi.

Kinerja sasaran strategis BPPSDMP pada tahun 2010 secara global mencapai 102,48% dengan kisaran 0%-530,67%. Sedangkan realisasi serapan anggaran mencapai 87,51%, atau sebesar Rp. 1.091.767.022.366 dari total pagu anggaran Rp. 1.247.591.158.000. Hasil analisis efisiensi capaian indikator kinerja BPPSDMP pada tahun 2010 menunjukkan nilai yang efisien atau lebih besar dari 1, yaitu 1,17. Disisi lain capaian realisasi serapan anggaran BPPSDMP pada tahun 2010 sebesar 87,51% merupakan yang tertinggi selama 6 tahun terakhir.

Beberapa permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan BPPSDMP pada tahun 2010 adalah tidak terserapnya anggaran sesuai target optimal, belum mantapnya kelembagaan pendidikan pertanian, belum sempurnanya dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan dan anggaran, pembinaan manajemen yang belum optimal, terlambatnya penyelesaian administrasi keuangan, terbatasnya kuantitas maupun kualitas pengelola keuangan Satker Dekon/TP sehingga lebih memprioritaskan kegiatan APBD serta sering terjadinya pergantian pejabat KPA/PPK pada Satker Dekon/TP. Menyikapi kondisi tersebut, maka langkah antisipasi yang harus dilakukan untuk tahun mendatang adalah: segera menyusun jadwal palang secara lebih cermat setelah DIPA terbit, menyempurnakan mekanisme dan tata hubungan kerja antar unit kerja terkait guna mempercepat penyelesaian kegiatan, menyempurnakan dokumen pendukung sesuai perkembangan yang terjadi, meningkatkan intensitas dan kualitas pembinaan di lingkup BPPSDMP, penyelesaian administrasi keuangan secara tepat waktu, penerapan sistem *reward and punishment* yang tegas, dan meminta agar pergantian pejabat KPA/PPK pada Satker lingkup BPPSDMP tidak dilakukan pada saat kegiatan telah berjalan.



KATA PENGANTAR

Sesuai Permentan Nomor: 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, tugas Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) adalah melaksanakan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan fungsi-fungsi: (a) penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standarisasi dan sertifikasi SDM pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (b) pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standarisasi dan sertifikasi SDM pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (c) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standarisasi dan sertifikasi SDM pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan (d) pelaksanaan administrasi BPPSDMP.

Pelaksanaan tugas dan fungsi BPPSDMP di Pusat, didukung oleh empat unit kerja Eselon II, yaitu: (1) Pusat Penyuluhan Pertanian; (2) Pusat Pelatihan Pertanian; (3) Pusat Pendidikan, Standarisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian; serta (4) Sekretariat BPPSDMP. Di tingkat operasional lapangan, BPPSDMP didukung oleh 19 UPT (20 Satker), 35 Satker Dekonsentrasi (Bakorluh/Dinas Lingkup pertanian Provinsi), dan 73 Satker Tugas Pembantuan (Bapelluh/Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota).

Sebagaimana diatur dalam Impres Nomor 7/1999 dan Keputusan Kepala LAN Nomor: 239/IX/6/B/2003 serta dilengkapi PermenPAN dan RB Nomor: 29/2010, maka disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPPSDMP Tahun 2010. LAKIP BPPSDMP ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan BPPSDMP selama tahun 2010.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat bagi pihak-pihak terkait.

Jakarta, Februari 2011

Dr. Ir. Ato Suprpto, MS.
NIP. 19520202 197901 1001

DAFTAR ISI

		Halaman
	RINGKASAN EKSEKUTIF	i
	KATA PENGANTAR	iii
	DAFTAR ISI	iv
	DAFTAR TABEL	v
	DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I.	PENDAHULUAN	1
	A. Tugas dan Fungsi	1
	B. Organisasi dan Tata Kerja	1
	C. Lingkungan Strategis Organisasi	3
BAB II.	RENCANA STRATEJIK DAN RENCANA KINERJA TAHUNAN	4
	A. Rencana Strategik (Renstra)	4
	1. Visi	4
	2. Misi	4
	3. Tujuan	4
	4. Sasaran	4
	5. Kebijakan/Strategi	8
	6. Program dan Kegiatan	8
	B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan/perjanjian Kinerja	9
BAB III.	AKUNTABILITAS KINERJA	17
	A. Hasil Pengukuran Kinerja.....	17
	B. Penilaian Pencapaian Kinerja	21
	C. Analisis Kinerja	21
	D. Analisis Efisiensi Capaian Indikator Kinerja	22
BAB V.	PENUTUP	24
	LAMPIRAN	25

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Sasaran dan Indikator Sasaran BPPSDMP Tahun 2010-2014	5
2. Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja BPPSDMP Tahun 2010	10
3. Hasil Pengukuran Kinerja BPPSDMP Tahun 2010	17
4. Perkembangan Realisasi Serapan Anggaran BPPSDMP Tahun 2005-2010	22

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Form Rencana Strategik BPPSDMP Tahun 2010-2014	26
2. Pegawai BPPSDMP Tahun 2010	30



BAB I PENDAHULUAN

A. Tugas dan Fungsi

Sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, maka nomenklatur Departemen Pertanian berubah menjadi Kementerian Pertanian. Demikian pula dengan nomenklatur Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mengalami perubahan menjadi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP). Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, tugas BPPSDMP adalah melaksanakan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPPSDMP menyelenggarakan fungsi-fungsi: (a) penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standardisasi dan sertifikasi SDM pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (b) pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standardisasi dan sertifikasi SDM pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (c) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standardisasi dan sertifikasi SDM pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan (d) pelaksanaan administrasi BPPSDMP.

B. Organisasi dan Tata Kerja

Pelaksanaan tugas dan fungsi BPPSDMP di Pusat, didukung oleh empat unit kerja Eselon II, yaitu: (1) Pusat Penyuluhan Pertanian; (2) Pusat Pelatihan Pertanian; (3) Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian; serta (4) Sekretariat BPPSDMP.

Pusat Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, penyuluhan serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Penyuluhan Pertanian menyelenggarakan fungsi-fungsi: (1) penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta informasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian; (2) pelaksanaan

penyelenggaraan penyuluhan pertanian; (3) pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan pertanian; dan (4) pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan kelembagaan petani dan usahatani. Organisasi Pusat Penyuluhan Pertanian terdiri dari 3 bidang, 6 subbidang, dan kelompok jabatan fungsional, yaitu:

1. Bidang Program dan Informasi dengan Subbidang: (1) Program dan Kerjasama; (2) Informasi dan Materi;
2. Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan dengan Subbidang: (1) Kelembagaan Penyuluhan; (2) Ketenagaan Penyuluhan;
3. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Petani dan Usahatani dengan Subbidang: (1) Kelembagaan Petani; (2) Usahatani;
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pusat Pelatihan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pelatihan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Penyuluhan Pertanian menyelenggarakan fungsi-fungsi: (1) penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, kerjasama, dan pemantauan, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelatihan pertanian; (2) pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan pertanian; (3) pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan ketenagaan pelatihan pertanian. Organisasi Pusat Pelatihan Pertanian terdiri dari 3 bidang, 6 subbidang, dan kelompok jabatan fungsional, yaitu:

1. Bidang Program dan Kerjasama dengan Subbidang: (1) Program; (2) Kerjasama;
2. Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan Pelatihan dengan Subbidang: (1) Kelembagaan Pelatihan; (2) Ketenagaan Pelatihan;
3. Bidang Penyelenggaraan Pelatihan dengan Subbidang: (1) Sistem dan Metode; (2) Evaluasi Penyelenggaraan;
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pendidikan, standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian menyelenggarakan fungsi-fungsi: (1) penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, kerjasama, dan pemantauan, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pendidikan, standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian; (2) pelaksanaan pengembangan di bidang pendidikan pertanian; dan (3) pelaksanaan penyusunan di bidang standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian. Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian terdiri dari 3 bidang, 6 subbidang, dan kelompok jabatan fungsional, yaitu:

1. Bidang Program dan Kerjasama dengan Subbidang: (1) Program; (2) Kerjasama;
2. Bidang Pendidikan dengan Subbidang: (1) Penyelenggaraan Pendidikan; (2) Kelembagaan dan Ketenagaan Pendidikan;
3. Bidang Standardisasi dan Sertifikasi Profesi dengan Subbidang: (1) Standardisasi Kompetensi; (2) Sertifikasi Profesi;
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat BPPSDMP mempunyai tugas *memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPPSDMP*. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat BPPSDMP menyelenggarakan fungsi-fungsi: (a) koordinasi, dan penyusunan rencana dan program penyuluhan dan pengembangan sumberdaya manusia pertanian; (b) pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan; (c) penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan tatalaksana, serta pengelolaan urusan kepegawaian; (d) evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik; serta (e) pelaksanaan urusan tata usaha BPPSDMP. Struktur organisasi Sekretariat BPPSDMP terdiri dari 4 Bagian dan 12 Subbagian serta Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu:

1. Bagian Perencanaan, dengan Subbagian-subbagian: (1) Program dan Kerjasama; (2) Data SDM dan Ketenagakerjaan Pertanian; serta (3) Anggaran;
2. Bagian Keuangan dan Perlengkapan, dengan Subbagian-subbagian: (1) Perbendaharaan; (2) Akuntansi dan Verifikasi; serta (3) Perlengkapan;
3. Bagian Umum, dengan Subbagian-subbagian: (1) Hukum dan Organisasi; (2) Kepegawaian; dan (3) Tata Usaha dan Rumah Tangga; serta
4. Bagian Evaluasi dan Pelaporan, dengan Subbagian-subbagian: (1) Evaluasi; (2) Pelaporan; dan (3) Hubungan Masyarakat.
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

C. Lingkungan Strategis Organisasi

Lingkungan strategis organisasi terdiri dari lingkungan strategis internal dan eksternal, baik yang bersifat positif maupun negatif. Dalam konteks organisasi, lingkungan internal positif, yaitu kekuatan (*strength*) meliputi: (1) keberadaan kelembagaan BPPSDMP dengan Unit Pelaksana Teknisnya (UPT), (2) keberadaan lembaga-lembaga pendidikan, pelatihan, maupun penyuluhan pertanian di daerah milik Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota maupun milik petani; (3) jumlah aparatur BPPSDMP di Pusat dan UPT sebanyak 2.465 orang dengan komposisi SLTA kebawah sebanyak 44,99% dan lulusan perguruan tinggi (D1-S3) sebanyak 55,01%), serta keberadaan petugas dan penyuluh pertanian di daerah (penyuluh PNS, honorer, swadaya, Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian/THL-TBPP).

Lingkungan internal organisasi yang negatif, yaitu kelemahan (*weaknesses*) yang dirasakan hingga saat ini meliputi: (1) terbatas dan belum meratanya kesempatan pengembangan kemampuan bagi petugas; dan (2) belum optimalnya dukungan sarana prasarana, anggaran operasional kegiatan dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait.

Lingkungan strategis eksternal organisasi yang positif, yaitu peluang (*opportunities*) meliputi: (1) dukungan atau *sharing* pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian; (2) peningkatan kemampuan swadaya masyarakat dalam penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian di wilayahnya; (3) dukungan kerjasama internasional dalam penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian.

Lingkungan strategis eksternal organisasi yang negatif, yaitu ancaman/tantangan (*threats*) meliputi: (1) kualitas sebagian besar SDM pertanian (petani) yang masih rendah; (2) berkurangnya minat generasi muda pada sektor pertanian; (3) lemahnya aksesibilitas petani pada lembaga permodalan, lembaga penyedia sarana produksi, lembaga pemasaran dan sumber informasi/teknologi; (3) kemiskinan, pengangguran dan penyediaan lapangan kerja pertanian.



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategik (Renstra)

Rencana strategik BPPSDMP tahun 2010-2014 disusun dengan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Visi

Visi BPPSDMP selama 5 tahun kedepan (2010-2014) adalah: ***terwujudnya sumberdaya manusia pertanian yang profesional, kreatif, inovatif dan berwawasan global dalam rangka meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah, ekspor dan kesejahteraan petani.***

2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visinya, BPPSDMP menetapkan empat misi, yaitu: (1) mengembangkan sistem penyuluhan pertanian yang komprehensif dan terpadu; (2) mengembangkan sistem pelatihan pertanian yang berbasis kompetensi kerja; (3) mengembangkan pendidikan, standardisasi dan sertifikasi profesi SDM pertanian yang kredibel; serta (4) mengembangkan sistem administrasi manajemen yang transparan dan akuntabel.

3. Tujuan

Sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka tujuan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian selama lima tahun kedepan adalah: (1) meningkatkan kompetensi dan kemandirian petani dalam rangka peningkatan produktivitas petani, usahatani dan pendapatan petani; (2) meningkatkan kompetensi kerja aparatur dan non-aparatur pertanian; (3) menghasilkan aparatur dan non-aparatur yang kompeten serta sistem standarisasi dan sertifikasi profesi SDM pertanian yang kredibel; serta (4) meningkatkan pelayanan dan tata kelola administrasi dan manajemen yang efektif dan efisien.

4. Sasaran

Sasaran strategis yang ingin dicapai BPPSDMP dalam kurun waktu 2010-2014 adalah: (1) meningkatnya kompetensi 319.383 orang aparatur pertanian; (2) meningkatnya kapasitas 110.550 orang non-aparatur pertanian (tenaga teknis tingkat menengah, calon wirausahawan muda, pelaku utama dan pelaku usaha pertanian); (3) bertumbuhkembangnya 72.880 kelembagaan petani (Gapoktan, P4S, Asosiasi); dan (4) meningkatnya kepuasan pelayanan birokrasi serta tersusunnya laporan kinerja dan keuangan yang akuntabel dan berstatus ***wajar tanpa pengecualian (WTP).***

Rincian sasaran dan indikator sasaran BPPSDMP selama tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut (Tabel 1):

Tabel 1. Sasaran dan Indikator Sasaran BPPSDMP Tahun 2010-2014

No.	Sasaran	
	Uraian	Indikator Sasaran
1.	Termanfaatkannya petani sukses menjadi Penyuluh Swadaya	☛ 10.000 Penyuluh Swadaya
2.	Ditetapkannya setiap tahun, programa penyuluhan pertanian nasional dan rencana kegiatan tahunan yang mendukung empat sukses pembangunan pertanian, antisipatif terhadap perubahan iklim dan kelestarian lingkungan hidup, serta responsif gender	☛ 5 Programa Penyuluhan Pertanian Nasional ☛ 5 Rencana Kegiatan Tahunan
3.	Terselenggaranya penyuluhan yang dikelola petani di kabupaten dan provinsi sasaran FEATI	☛ 68 Kabupaten/Kota ☛ 18 Provinsi
4.	Terselenggaranya pemberdayaan pedesaan dan pembangunan pertanian di lokasi READ	☛ 150 Desa ☛ 5 Kabupaten ☛ 1 Provinsi
5.	Meningkatnya kompetensi non-aparatur melalui pelatihan dan permagangan pertanian yang mendukung empat sukses pembangunan pertanian, mengantisipasi perubahan iklim, dan kelestarian lingkungan hidup, serta responsif gender	☛ 97.814 Orang
6.	Terselesaikannya peraturan tentang penyuluhan pertanian	☛ 5 Peraturan Presiden ☛ 3 Peraturan Menteri Pertanian
7.	Terfasilitasinya pembentukan kelembagaan penyuluhan pertanian	☛ 19 Bakorluh ☛ 200 Bapelluh ☛ 500 Balai Penyuluhan Kecamatan ☛ 522 BPP Model ☛ 28.304 Pos Penyuluhan Desa/Kel.
8.	Terfasilitasinya penyuluh pertanian PNS dan THL-TBPP	☛ 27.922 Penyuluh Pertanian PNS ☛ 24.608 THL-TBPP
9.	Terselesaikannya Penyuluh Honorer menjadi PNS dan THL-TBPP menjadi Pegawai Tidak Tetap	☛ 1.237 Penyuluh Honorer ☛ 24.608 THL-TBPP
10.	Tersedianya satu dokumen data dan informasi mutakhir tentang kelembagaan penyuluhan, kelembagaan petani, serta ketenagaan penyuluh PNS dan Penyuluh Swadaya	☛ 5 Dokumen Datin Kelembagaan Penyuluhan ☛ 5 Dokumen Datin Kelembagaan Petani ☛ 5 Dokumen Datin Penyuluh PNS ☛ 5 Dokumen Datin Penyuluh Swadaya
11.	Tersedianya sistem informasi dan materi penyuluhan melalui <i>cyber extension</i>	☛ 1 Sistem Informasi penyuluhan (<i>cyber extension</i>) ☛ Materi Penyuluhan 7 subsektor

No.	Sasaran	
	Uraian	Indikator Sasaran
12.	Meningkatnya eselonering UPT Pelatihan Pusat, dan penataan kelembagaan UPT Pelatihan Pusat serta UPT Pelatihan Daerah	2 UPT Pelatihan Pusat (Peningkatan Eselonering) 10 UPT Pelatihan Pusat (Penataan) 19 UPT Pelatihan Daerah (Penataan)
13.	Terstandarisasinya sarana prasarana di UPT Pelatihan Pertanian	10 UPT Pelatihan
14.	Terstandarisasi dan terpetakannya spesialisasi dan meningkatnya profesionalisme Widyaiswara dan tenaga teknis kediklatan pada UPT Pusat dan Daerah	290 Widyaiswara 790 Tenaga Teknis Kediklatan
15.	Terbitnya pedoman dan materi pelatihan mendukung empat sukses pembangunan pertanian, mengantisipasi perubahan iklim, dan kelestarian lingkungan hidup,serta reformasi birokrasi	21 Pedoman dan Materi Pelatihan
16.	Meningkatnya kompetensi orang aparatur melalui pelatihan pertanian yang mendukung reformasi birokrasi, empat sukses pembangunan pertanian, mengantisipasi perubahan iklim, dan kelestarian lingkungan hidup, serta responsif gender	108.825 Orang
17.	Ditetapkannya program pelatihan yang terintegrasi dan sinkron dengan program instansi terkait	14 Program Pelatihan Terintegrasi/Sinkron
18.	Terfasilitasinya peserta dalam program kerjasama pelatihan internasional	300 orang
19.	Berkembangnya kelembagaan dan program studi di STPP	6 STPP 6 Program Studi
20.	Bertambahnya program studi RIHP non-penyuluhan pertanian dan program studi perkarantinaaan di STPP;	5 PS RIHP Non-Penyuluhan 1 PS Perkarantinaaan
21.	Meningkatnya status kelembagaan SPP menjadi Rintisan SMK-SPP Bertaraf Internasional (RSBI) dan SMK-SPP Bertaraf Internasional (SBI)	10 SMK-SPP
22.	Meningkatnya profesionalisme Guru dan tenaga kependidikan di SPP/SMK-SPP RSBI/SBI	600 Guru 100 Tenaga Kependidikan
23.	Meningkatnya profesionalisme Dosen dan tenaga kependidikan di STPP	210 Dosen 50 Tenaga Kependidikan
24.	Tersedianya lulusan SPP/SMK-SPP yang kompeten sebagai tenaga teknis menengah dan calon wirausahawan muda pertanian	15.000 Lulusan SMK-SPP
25.	Tersedianya sarjana sains terapan bidang penyuluhan pertanian dan RIHP non-penyuluh pertanian serta perkarantinaaan pertanian	2.460 Sarjana Sains Terapan

No.	Sasaran	
	Uraian	Indikator Sasaran
26.	Terealisasinya pemberian tugas belajar pendidikan pasca sarjana bagi aparatur	☞ 250 Aparatur
27.	Terfasilitasinya 150 alumni SPP/SMK-SPP mengikuti program <i>sister school</i> dan magang serta 15 siswa SPP/SMK-SPP mengikuti pertukaran siswa dalam rangka kerjasama teknis luar negeri	☞ 150 Alumni SMK-SPP ☞ 15 Siswa SMK-SPP
28.	Terbentuknya Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bidang pertanian	☞ 6 LSP
29.	Tersedianya Asessor, Verifikator dan Perumus Standar Kompetensi	☞ 300 Asessor, Verifikator dan Perumus Standar Kompetensi
30.	Terakreditasinya UPT Pelatihan menjadi Lembaga Diklat Profesi (LDP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUK)	☞ 7 UPT Pelatihan Pertanian
31.	Tersedianya Penyuluh Pertanian yang memiliki sertifikat profesi	☞ 5.000 orang Penyuluh
32.	Terbitnya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan)	☞ 30 SKKNI Bidang Pertanian
33.	Terfasilitasinya penumbuhan Gapoktan dengan program pemberdayaan petani dan pengembangan Gapoktan menjadi kelembagaan ekonomi petani	☞ 20.000 Gapoktan ☞ 300 Kelembagaan Ekonomi Petani
34.	Tertata dan terklasifikasinya kelembagaan P4S	☞ 708 P4S
35.	Terpetakannya spesialisasi dan meningkatnya kompetensi instruktur P4S	☞ 2.100 Instruktur P4S
36.	Tertatanya dan berkembangnya organisasi dan kelembagaan BPPSDMP	☞ Pusat dan 20 UPT
37.	Terstrukturisasinya program dan anggaran berbasis kinerja serta terselesaikannya dokumen perencanaan dan kerjasama Satuan Kerja (Satker) lingkup BPPSDMP	☞ 130 Satker
38.	Terwujudnya revitalisasi pengelolaan anggaran dan barang milik negara (BMN) dalam mendukung terwujudnya pelaporan keuangan yang akuntabel dan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Satker lingkup BPPSDMP	☞ 130 Satker
39.	Terwujudnya optimalisasi pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Satker lingkup BPPSDMP	☞ 130 Satker
40.	Meningkatnya efektivitas kehumasan dan ketatausahaan dalam rangka peningkatan citra BPPSDMP	☞ Pusat dan 20 UPT

5. Kebijakan/Strategi

Untuk mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan selama periode 2010-2014, maka strategi penyuluhan dan pengembangan SDM yang dilakukan meliputi:

1. Penataan serta peningkatan jumlah dan kompetensi penyuluh pertanian mulai dari Tingkat Desa sampai Tingkat Pusat;
2. Penataan kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan petani;
3. Pengembangan sistem informasi penyuluhan pertanian yang mendukung empat sukses pembangunan pertanian sertaantisipasi perubahan iklim, kelestarian lingkungan dan responsif gender;
4. Penguatan dan pengembangan lembaga Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S);
5. Penumbuhan wirausahawan muda dibidang agribisnis melalui *agri-training camp*, magang, pelatihan kewirausahaan pertanian dan pendidikan menengah kejuruan pertanian;
6. Restrukturisasi kelembagaan dan pengembangan program studi pendidikan tinggi pertanian kedinasan;
7. Penataan dan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian untuk meningkatkan kompetensi dalam rangka mendukung program pembangunan pertanian dan reformasi birokrasi;
8. Pengembangan SKKN untuk komoditas unggulan dalam rangka mendukung daya saing dan nilai tambah;
9. Pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bidang penyuluhan, teknis dan kewirausahaan agribisnis;
10. Pemantapan dan pengembangan tata kelola administrasi dan manajemen penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian.

6. Program dan Kegiatan

Tahun 2010 merupakan tahun peralihan, dimana program dan kegiatan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian pada tahun 2010 disusun dengan mengacu kepada Program Kementerian Pertanian dan juga Program Bappenas pada tahun 2009, yaitu: (1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani; (2) Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik; (3) Program Pendidikan Tinggi; dan (4) Program Pendidikan Menengah. Penerapan reformasi Program Berbasis Kinerja, dimana setiap Eselon I hanya memiliki 1 program yang sesuai dengan tugas dan fungsinya, baru akan diimplementasikan mulai tahun anggaran 2011. Program Berbasis Kinerja BPPSDMP Periode 2011-2014 adalah *Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani*. Mengacu kepada program-program tersebut, maka kegiatan utama yang dilakukan pada tahun 2010 meliputi kegiatan-kegiatan: (1) pemantapan sistem penyuluhan pertanian; (2) pemantapan sistem pelatihan pertanian; (3) revitalisasi sistem pendidikan pertanian; (4) pengembangan standarisasi dan sertifikasi profesi SDM pertanian; serta (5) dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya.

Secara menyeluruh kegiatan masing-masing program adalah sebagai berikut:

- Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
 - a. Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)
 - 1) Penyebaran informasi PUAP, pemberian penghargaan, pembinaan Poktan dan Gapoktan;
 - 2) Pelatihan bagi pengelola Gapoktan, penyuluh pendamping dan penyelia mitra tani (PMT) PUAP;
 - 3) Temu penyuluh pendamping dan pengurus Gapoktan PUAP.
 - b. Penguatan Kelembagaan Ekonomi Perdesaan melalui LM3.
 - c. Magang, SL dan Pelatihan, Pendidikan Pertanian dan Kwirausahaan Agribisnis
 - 1) Pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan pertanian;
 - 2) Penyelenggaraan pendidikan pertanian;
 - 3) Sinkronisasi kebijakan dan program peningkatan kesejahteraan petani.
 - d. Peningkatan Sistem Penyuluhan SDM Pertanian dan Pengembangan Kelompok Tani
 - 1) Pembinaan dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
 - 2) Pemberdayaan petani, pelaku agribisnis dan penyuluhan pertanian di kawasan FEATI;
 - 3) Pengembangan pertanian dan pemberdayaan perdesaan (Rural Empowerment and Agricultural Development).
- Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik
 - a. Pengelolaan gaji, penyelenggaraan perkantoran dan pelayanan birokrasi.
- Program Pendidikan Menengah
 - a. Penyelenggaraan pendidikan SDM pertanian di SPP.
- Program Pendidikan Tinggi
 - a. Penyelenggaraan pendidikan SDM pertanian di STPP.

B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) DAN Perjanjian/Penetapan Kinerja Tahun 2010

Mengacu kepada Renstra BPPSDMP Tahun 2010-2014, maka Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPPSDMP untuk tahun 2010 adalah sebagai berikut (Tabel 2):

Tabel 2. Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja BPPSDMP Tahun 2010

Unit Eselon I : Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP)

Tahun : 2010

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Output		Indikator Kinerja Outcome	
	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Outcome
1. Meningkatnya kapasitas dan kompetensi non-aparatur (petani, pelaku usaha, calon wirausahawan, dll) dan aparatur pertanian	1. Terfasilitasinya pembentukan kelembagaan penyuluhan pertanian 2. Tersosialisasinya PP No. 43/2009 tentang pembiayaan, pembinaan dan pengawasan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan 3. Terbitnya Perpres tentang kelembagaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan. 4. Terselesaikannya pembaha-ruan kontrak bagi THL-TBPP Angkatan I (2007). 5. Tersalurkannya BOP bagi Penyuluh PNS dan Honorarium bagi THL-TBPP. 6. Terbangunnya <i>cyber extension</i> dan tersalurkannya alat pengolah data. 7. Tersalurkannya media informasi pertanian kepada penyuluh dan THL-TBPP 8. Terbinanya penyuluh swadaya 9. Tersusunnya Programa Penyuluhan Pertanian Nasional	33 Prov. 355 Kab./Kota 1 Paket (1 PP, 33 Provinsi) 1 Perpres 5.606 Orang 27.922 PP PNS dan 23.266 T HL-TBPP 33 Provinsi, 240 Kab./Kota 1.000 Unit 52.148 Orang 60 Orang 1 Programa PP nasional 1 Renc. Kerja Tahunan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluhan pertanian di seluruh provinsi	33 Provinsi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Output		Indikator Kinerja Outcome	
	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Outcome
	10. Tumbuhnya usaha agribisnis dan kelembagaan petani (Poktan/Gapoktan) melalui Farmers Managed Activities (FMA).	3.080 Desa (Gapoktan)	Terselenggaranya penyuluhan yang dikelola petani	18 Provinsi, 68 Kabupaten
	11. Tumbuhnya penyuluh swadaya.	6.160 Orang		
	12. Tumbuhnya kepengurusan FMA.	9.240 orang		
	13. Terasilinasinya kemitraan petani dengan perusahaan/ swasta.	1.232 Paket		
	14. Terbangunnya gedung BPP baru.	89 Unit		
	15. Terehabilitasinya gedung BPP lama.	81 Unit		
	16. Tersedianya perlengkapan kantor untuk BPP.	1.205 Paket		
	17. Tersusunnya pedoman FMA, pedoman pembentukan kelembagaan tani, kurikulum pelatihan agribisnis dan pedoman Monev FEATI	4 Paket		
	18. Terbimbing dan terbinanya pelaksanaan FEATI	18 Provinsi, 68 Kab.		
	19. Terselenggaranya rencana aksi anti korupsi di lokasi FEATI	18 Provinsi, 68 Kab.		

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Output		Indikator Kinerja Outcome	
	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target
	20. Terlatihnya petani dan aparat desa/Pemda peserta Program READ di 5 kabupaten.	750 Petani 125 Petugas	Berjalannya usaha kelompok di desa lokasi READ	30 desa
	21. Tersalurkannya bantuan modal usaha kelompok melalui Unit Pengelola Dana Desa (UPDD).	30 UPDD		
	22. Terlaksananya pembangunan infrastruktur pedesaan di 30 desa lokasi READ melalui UPDD.	30 UPDD		
	23. Tersedianya kendaraan roda 2.	20 Unit		
	24. Tersedianya alat pengolah data.	7 Paket		
	25. Terfasilitasinya PIA di UPT Pelatihan.	7 UPT Pelat.	Meningkatnya kinerja aparatur dan non-aparatur di bidangnya	9.597 orang
	26. Terfasilitasinya peningkatan kapasitas kompetensi Widyaiswara.	540 Orang		
	27. Terfasilitasinya peningkatan kapasitas pengelola P4S.	390 Orang		
	28. Terselenggaranya Pelatihan bagi aparatur .	4.235 Orang		
	29. Terselenggaranya pelatihan bagi non-aparatur.	4.334 Orang		
	30. Terselenggaranya kerjasama pelatihan luar negeri bagi negara-negara ASEAN, Asia Selatan, Pasifik dan Afrika	98 Orang		

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Output		Indikator Kinerja Outcome	
	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target
	31. Terstandarisasi & terakreditasinya jenis profesi SDM pertanian.	3 Jenis	Tersedianya SDM pertanian yang profesional di bidang pertanian	2.554 Orang
	32. Meningkatnya kualitas lembaga pendidikan.	8 Lembaga		
	33. Meningkatnya jenjang pendidikan formal aparatur.	99 Orang		
	34. Terlaksananya kerjasama pendidikan dalam dan luar negeri.	3 Kegiatan KS		
	35. Tersalurnya bantuan modal kerja usaha bagi lulusan SPP terbaik menjadi wirausahawan muda.	35 Paket (Orang)		
	36. Tersalurnya fasilitasi bagi SPP untuk pendampingan wirausahawan muda pertanian.	25 Paket (SPP)		
	37. Terselenggaranya Diklat Fung-sional RIHP bagi penyuluh dan non-penyuluh pertanian.	2.240 Orang		
	38. Terevaluasinya pelaksanaan retooling di bidang kelapa sawit.	1 Paket		
	39. Tersusunnya SKKNI bidang pertanian	3 SKKNI		
	40. Terasilinasinya sertifikasi penyuluh pertanian.	600 Orang		
	41. Terasilinasinya pembentukan LSP/LDP.	7 LSP/LDP		
	42. Meningkatnya kompetensi Bahasa Inggris guru dan dosen .	60 Guru 60 Dosen		
	43. Peningkatan keterampilan dasar teknis instruksional dosen STPP.	30 Dosen		
	44. Pengembangan Asesor Kompetensi bersertifikat.	31 Orang		

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Output		Indikator Kinerja Outcome	
	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target
	45. Terselenggaranya pendidikan menengah pertanian di SPP/SMK-SPP.	3 SPPN 66 SPP Swasta 15.000 Siswa 5.000 Lulusan	- Termanfaatkannya lulusan SPP/SMK-SPP menjadi tenaga teknis menengah dan wirausahawan muda pertanian	3.000 Lulusan
	46. Terselenggaranya pendidikan tinggi pertanian di STPP	557 Orang 687 Orang	- Meningkatnya mutu lulusan - Diserapnya alumni retooling oleh perusahaan perkebunan	
2. Bertumbuhkembangnya kelembagaan petani	47. Terbina dan terakreditasinya P4S. 48. Terfasilitasinya kelembagaan P4S. 49. Tersebarnya informasi PUAP melalui media cetak (leaflet, brosur, poster, dan folder). 50. Terselenggaranya Siaran pedesaan melalui radio. 51. Terselenggaranya penghargaan bagi penyuluh dan petani berprestasi di lokasi PUAP	40 P4S 20 P4S 115.000 Eksp. 57 kali 33 penyuluh dan 33 petani	- Meningkatnya kemandirian kelembagaan petani	33 Provinsi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Output		Indikator Kinerja Outcome	
	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target
	52. Terlatihnya pengelola Gapoktan , penyuluh pendamping dan PMT PUAP.	22.560 Orang		
	53. Terselenggaranya pelatihan teknis dan pendampingan bagi pengelola dan pendamping LM3.	1.200 pengelola LM3, 1.200 pendamping		
	54. Terpilihnya LM3 Model.	30 LM3 Model		
	55. Terselenggaranya Studi Banding bagi LM3 Model.	120 Orang		
	56. Tersusunnya Modul pelatihan bagi pengelola dan pendamping LM3.	2.400 Eksp.		
	57. Terselenggaranya pengkajian dampak program LM3.	1 Laporan Kajian		
	58. Tersusunnya Pedoman Umum LM3.	1.200 Eksp.		
	59. Tersedianya Bahan informasi LM3 dalam bentuk media tercetak dan audio-visual.	2 paket siaran TV, 2 paket siaran radio, 1 paket media cetak		
	60. Terselenggaranya Apresiasi dan Komunikasi Teknologi Informasi LM3	66 orang		
	61. Terselenggaranya pameran LM3.	60 LM3		
	62. Tersusunnya Pemetaan Data Potensi dan Kerjasama LM3.	1 Paket		
	63. Terlaksananya moneyv LM3	1 Dok. Laporan		

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Output		Indikator Kinerja Outcome	
	Output	Target	Outcome	Target
3. Meningkatnya kepuasan pelayanan birokrasi serta tersusunnya laporan kinerja dan keuangan yang akuntabel dan berstatus wajar tanpa pengecualian (WTP)	64. Tereleaksasinya Renja, Tap-ja, RKA-KL dan DIPA TA 2011.	130 Satker	Meningkatnya kinerja Satker lingkup BPPSDMP	130 Satker
	65. Terlaksananya pembinaan pegawai serta penyempurnaan ketatalaksanaan dan pelayanan di UPT dan Pusat.	20 UPT & Pusat		
	66. Tereleaksasinya pengelolaan aset barang milik negara.	20 UPT & Pusat		
	67. Terselenggaranya rekonsiliasi 130 laporan keuangan	12 Bulan (Kali)		
	68. Tereleaksasinya Monev, Pelaporan dan Pengendalian Intern.	130 Satker		
	69. Terbayarnya gaji pegawai BPPSDMP tepat waktu.	20 UPT & Pusat		
	70. Terselenggaranya operasional perkantoran.	20 UPT & Pusat		

Jumlah Anggaran Program (1) Peningkatan Kesejahteraan Petani, (2) Pendidikan Menengah, (3) Pendidikan Tinggi, dan (4) Penerapan Pemerintahan yang baik TA 2010: *Rp. 1.247.591.158.000*



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Hasil Pengukuran Kinerja

Secara menyeluruh, hasil pengukuran kinerja BPPSDMP pada tahun 2010 disajikan pada Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3.
Hasil Pengukuran Kinerja BPPSDMP Tahun 2010

Unit Eselon I : Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP)
Tahun : 2010

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			
	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1. Meningkatnya kapasitas dan kompetensi non-aparatur (petani, pelaku usaha, calon wirausahawan, dll) dan aparatur pertanian	1. Terasilitasinya pembentukan kelembagaan penyuluhan pertanian	33 Prov.	28 Prov.	84,85
	2. Tersosialisasinya PP No. 43/2009 tentang pembiayaan, pembinaan dan pengawasan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan	355 Kab./Kota	340 Kab.	95,77
	3. Terbitnya Perpres tentang kelembagaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.	1 Paket (1 PP, 33 Provinsi) 1 Perpres	33 Prov. 1 Perpres	100,00 100,00
	4. Tereleaksikannya pembaha-ruan kontrak bagi THL-TBPP Angkatan I (2007).	5.606 Orang	5.117 Orang	91,28
	5. Tersalurnya BOP bagi Penyuluh PNS dan Honorarium bagi THL-TBPP.	27.922 PP PNS, 23.266 THL-TBPP	27.922 PP PNS, 23.266 THL-TBPP	100,00 100,00
	6. Terbangunnya <i>cyber extension</i> dan tersalurnya alat pengolah data.	33 Provinsi, 240 Kab./Kota 1.000 Unit	33 Prov., 240 Kab. 1.000 Unit	100,00 100,00
	7. Tersalurnya media informasi pertanian kepada penyuluh dan THL-TBPP	52.148 Orang	52.148 Orang	100,00
	8. Terbinanya penyuluh swadaya	60 Orang	60 Orang	100,00
	9. Tersusunnya Programa Penyuluhan Pertanian Nasional	1 Programa PP nasional 1 Renc. Kerja Tahunan	1 Programa PP 1 RKT	100,00 100,00
	10. Tumbuhnya usaha agribisnis dan kelembagaan petani (Poktan/Gapoktan) melalui Farmers Managed Activities (FMA).	3.080 Desa (Gapoktan)	3.080 Desa	100,00
	11. Tumbuhnya penyuluh swadaya.	6.160 Orang	6.160 Orang	100,00
	12. Tumbuhnya kepengurusan FMA.	9.240 Orang	9.240 Orang	100,00
	13. Terasilitasinya kemitraan petani dengan perusahaan/ swasta.	1.232 Paket	1.388	112,66

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			
	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1. Meningkatnya kapasitas dan kompetensi non-aparatur (petani, pelaku usaha, calon wirausahawan, dll) dan aparatur pertanian	14. Terbangunnya gedung BPP baru.	89 Unit	86 Unit	96,63
	15. Terehabilitasinya gedung BPP lama.	81 Unit	79 Unit	97,53
	16. Tersedianya perlengkapan kantor untuk BPP.	1.205 Paket	1.205 Paket	100,00
	17. Tersusunnya pedoman FMA, pedoman pembentukan kelembagaan tani, kurikulum pelatihan agribisnis dan pedoman Money FEATI	4 Paket	4 Paket	100,00
	18. Terbimbing dan terbinanya pelaksanaan FEATI	18 Provinsi, 68 Kab.	18 Prov., 68 Kab.	100,00
	19. Terselenggaranya rencana aksi anti korupsi di lokasi FEATI	18 Provinsi, 68 Kab.	18 Prov., 68 Kab.	100,00
	20. Terlatihnya petani dan aparat desa/Pemda peserta Program READ di 5 kabupaten.	750 Petani	3.980 Petani	530,67
	21. Tersalurkannya bantuan modal usaha kelompok melalui Unit Pengelola Dana Desa (UPDD).	125 Petugas	150 Petugas	120,00
	22. Terlaksananya pembangunan infrastruktur pedesaan di 30 desa lokasi READ melalui UPDD.	30 UPDD	30 UPDD	100,00
	23. Tersedianya kendaraan roda 2.	20 Unit	20 Unit	100,00
	24. Tersedianya alat pengolah data.	7 Paket	7	100,00
	25. Terfasilitasinya PIA di UPT Pelatihan.	7 UPT Pelat.	7 UPT	100,00
	26. Terfasilitasinya peningkatan kapa-sitas kompetensi Widyaiswara.	540 Orang	500 orang	92,59
	27. Terfasilitasinya peningkatan kapasitas pengelola P4S.	390 Orang	356 Orang	91,28
	28. Terselenggaranya Pelatihan bagi aparatur .	4.235 Orang	4.148 Orang	97,95
	29. Terselenggaranya pelatihan bagi non-aparatur.	4.334 Orang	4.228 Orang	97,55
	30. Terselenggaranya kerjasama pelatihan luar negeri bagi negara-negara ASEAN, Asia Selatan, Pasifik dan Afrika	98 Orang	98 Orang	100,00
	31. Terstandarisasi & terakreditasinya jenis profesi SDM pertanian.	3 jenis	1 Jenis	33,33
	32. Meningkatnya kualitas lembaga pendidikan.	8 Lembaga	8 SMK-SPP	100,00
	33. Meningkatnya jenjang pendidikan formal aparatur.	99 Orang	99 Orang	100,00
	34. Terlaksananya kerjasama pendidikan dalam dan luar negeri.	3 Kegiatan KS	3 KS	100,00
	35. Tersalurkannya bantuan modal kerja usaha bagi lulusan SPP terbaik menjadi wirausahawan muda.	35 Paket (Orang)	29 paket	82,86

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			
	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1. Meningkatnya kapasitas dan kompetensi non-aparatur (petani, pelaku usaha, calon wirausahawan, dll) dan aparatur pertanian	36. Terselenggaranya fasilitasi bagi SPP untuk pendampingan wirausahawan muda pertanian.	25 Paket (SPP)	17 Paket	68,00
	37. Terselenggaranya Diklat Fungsional RIHP bagi penyuluh dan non-penyuluh pertanian.	2.240 Orang	5.134 Orang	229,20
	38. Terevaluasinya pelaksanaan retooling di bidang kelapa sawit.	1 Paket	1 Paket	100,00
	39. Tersusunnya SKKNI bidang pertanian	3 SKKNI	3 SKKNI	100,00
	40. Terfasilitasinya sertifikasi penyuluh pertanian.	600 Orang	1 LSP/LDP	14,29
	41. Terfasilitasinya pembentukan LSP/LDP.	7 LSP/LDP	58 Guru & Dosen	96,67
	42. Meningkatnya kompetensi Bahasa Inggris guru dan dosen.	60 Guru & Dosen	30 Dosen	100,00
	43. Peningkatan keterampilan dasar teknis instruksional dosen STPP.	30 Dosen	31 Orang	103,33
	44. Pengembangan Asesor Kompetensi bersertifikat.	30 Orang	5.000 lulusan	100,00
	45. Terselenggaranya pendidikan menengah pertanian di SPP/SMK-SPP.	5.000 lulusan	557 Orang	100,00
	46. Terselenggaranya pendidikan tinggi pertanian di STPP	557 Orang		
2. Bertumbuhkembangnya kelembagaan petani	47. Terbina dan terakreditasinya P4S.	40 P4S	40 P4S	100,00
	48. Terfasilitasinya kelembagaan P4S.	20 P4S	20 P4S	100,00
	49. Tersebarnya informasi PUAP melalui media cetak.	115.000 Eksp.	92.000	80,00
	50. Terselenggaranya Siaran pedesaan melalui radio.	57 kali	57 kali	100,00
	51. Terselenggaranya penghargaan penyuluh & petani berprestasi dilokasi PUAP	33 penyuluh dan 33 petani	66 penyuluh/petani	100,00
	52. Terlatihnya pengelola Gapoktan, penyuluh pendamping dan PMT PUAP.	22.560 Orang	20.812	92,25
	53. Terselenggaranya pelatihan teknis dan pendampingan bagi pengelola dan pendamping LM3.	1.200 pengelola LM3,	1.117 Orang	93,08
		1.200 pendamping	989 Orang	82,42
	54. Terpilihnya LM3 Model.	30 LM3 Model	33 LM3 Model	110,00
	55. Terselenggaranya Studi Banding bagi LM3 Model.	120 Orang	120 Orang	100,00
	56. Tersusunnya Modul pelatihan bagi pengelola dan pendamping LM3.	2.400 Eksp.	2.400 Eksp.	100,00
	57. Terselenggaranya pengkajian dampak program LM3.	1 Laporan Kajian	1 laporan	100,00
	58. Tersusunnya Pedoman Umum LM3.	1.200 Eksp.	1.200 Eksp.	100,00
	59. Tersedianya Bahan informasi LM3 dalam bentuk media tercetak dan audio-visual.	2 paket siaran TV, 2 paket siaran radio, 1 pkt media cetak	2 TV, 2 Radio, 1 Media Cetak	100,00
	60. Terselenggaranya Apresiasi dan Komunikasi Teknologi Informasi LM3	132 orang	128 Orang	96,97
	61. Terselenggaranya pameran LM3.	60 LM3	54 LM3	90,00
	62. Tersusunnya Pemetaan Data Potensi dan Kerjasama LM3.	1 Paket	0 Paket	0,00
	63. Terlaksananya money LM3	1 Dok. Laporan	1 Dok. Laporan	100,00

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			
	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
3. Meningkatnya kepuasan pelayanan birokrasi serta tersusunnya laporan kinerja dan keuangan yang akuntabel dan berstatus wajar tanpa pengecualian (WTP)	64. Terelesainya Renja, Tap-ja, RKA-KL dan DIPA TA 2011.	130 Satker	130 Satker	100,00
	65. Terlaksananya pembinaan pegawai serta penyempurnaan ketatalaksanaan dan pelayanan di UPT dan Pusat.	20 UPT & Pusat	20 UPT & Pusat	100,00
	66. Terefasilitasinya pengelolaan aset barang milik negara.	20 UPT & Pusat	20 UPT & Pusat	100,00
	67. Terselenggaranya rekonsiliasi 130 laporan keuangan	12 Bulan (Kali)	12 Bulan (Kali)	100,00
	68. Terefasilitasinya Monev, Pelaporan dan Pengendalian Intern.	130 Satker	130 Satker	100,00
	69. Terbayarnya gaji pegawai BPPSDMP tepat waktu.	20 UPT & Pusat	20 UPT & Pusat	100,00
	70. Terselenggaranya operasional perkantoran.	20 UPT & Pusat	20 UPT & Pusat	100,00

Jumlah Anggaran Program (1) Peningkatan Kesejahteraan Petani, (2) Pendidikan Menengah, (3) Pendidikan Tinggi, dan (4) Penerapan Pemerintahan yang baik TA 2010: *Rp. 1.247.591.158.000*
Realisasi Anggaran TA 2010 : *Rp. 1.090.519.431.208 (87,41%)*

B. Penilaian Pencapaian Kinerja

Pencapaian kinerja sasaran strategis BPPSDMP pada tahun 2010, secara global tampak bervariasi dari 0% (kegiatan LM3 yang tidak terlaksana, yaitu *Pemetaan Data Potensi dan Kerjasama LM3*) sampai dengan 530,67% (pelatihan bagi petani di lokasi READ) dengan capaian rata-rata 102,48% atau melebihi dari target sasaran 100% dan berada pada kategori Baik. Berdasarkan 3 sasaran strategis, yakni: (1) meningkatnya kapasitas dan kompetensi non-aparatur dan aparatur pertanian; (2) bertumbuhkembangnya kelembagaan petani, serta (3) meningkatnya kepuasan pelayanan birokrasi serta tersusunnya laporan kinerja dan keuangan yang akuntabel dan berstatus WTP, maka pencapaian masing-masing sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kapasitas dan kompetensi non-aparatur serta aparatur pertanian, berkisar 14,29% hingga 530,67% dengan capaian kinerja rata-rata 107,01% (Baik).
2. Bertumbuhkembangnya kelembagaan petani, berkisar 0% sampai dengan 110,00% dengan capaian kinerja rata-rata 91,37% (Cukup Baik).
3. Meningkatnya kepuasan pelayanan birokrasi, seluruhnya mencapai 100% (Cukup Baik).

Realisasi serapan anggaran pada tahun 2010 pada umumnya tidak mencapai target optimal 100%. Kondisi ini disebabkan oleh tidak tercapainya target-target fisik pada beberapa kegiatan sehingga hal tersebut berpengaruh kepada realisasi serapan anggaran yang tidak mencapai target pula. Namun secara totalitas, tingkat realisasi serapan anggaran BPPSDMP pada tahun 2010 mencapai 87,41% (Rp. 1.090.519.431.208) dari total pagu anggaran sebesar Rp. 1.247.591.158.000, termasuk kategori cukup baik, karena telah berada di atas syarat minimal (76%) yang ditetapkan oleh Unit Kerja Presiden untuk Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan (UKP4).

C. Analisis Kinerja

Nilai pencapaian kinerja sasaran strategis BPPSDMP pada tahun 2008 tercatat berkisar antara 0,00%-100% dan pada tahun 2009 berkisar antara 0,00%-113,16%. Pada tahun 2010, nilai pencapaian kinerja sasaran kegiatan BPPSDMP tersebut mencapai kisaran 0%-530,67%. Kondisi ini menunjukkan perkembangan yang semakin baik dari tahun ke tahun, yang dicerminkan oleh capaian kinerja sasaran tertinggi terus meningkat dari 100% pada tahun 2008 menjadi 113,16% pada tahun 2009 dan 530,67% pada tahun 2010.

Realisasi serapan anggaran BPPSDMP pada tahun 2010 mencapai 87,41%, yaitu sebesar Rp. 1.090.519.431.208 dari total pagu anggaran sebesar Rp. 1.247.591.158.000. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, secara proporsional angka realisasi serapan anggaran pada tahun 2010 tampak lebih baik dan merupakan yang tertinggi selama 6 tahun terakhir sejak tahun 2005. Perkembangan realisasi serapan anggaran BPPSDMP selama 6 tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang fluktuatif seperti tampak pada Tabel 4 berikut ini.

Tabel 4.
Perkembangan Realisasi Serapan Anggaran BPPSDMP Tahun 2005-2010

Tahun	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2005	381.476.823.000	233.447.806.000	61,20
2006	670.872.803.000	547.095.346.000	81,55
2007	342.968.900.000	273.551.994.355	79,76
2008	940.068.111.000	780.633.105.000	83,04
2009	1.237.774.000.000	1.072.838.080.000	86,67
2010	1.247.591.158.000	1.090.519.431.208	87,41

D. Analisis Efisiensi Capaian Indikator Kinerja

Efisiensi capaian indikator kinerja kegiatan dapat dilihat dari perbandingan proporsi antara besarnya capaian indikator kinerja sasaran yang diperoleh dengan besarnya masukan/input yang digunakan (Proporsi Output/Input). Efisiensi terjadi apabila nilai rasio output dibandingkan dengan input mencapai 1 atau lebih dari 1. Perbandingan proporsi capaian global indikator kinerja sasaran strategis BPPSDMP dengan input yang digunakan adalah 102,48% berbanding 87,41%. Dengan demikian nilai efisiensi yang diperoleh adalah 1,17 atau berarti efisien.

Beberapa permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan BPPSDMP pada tahun 2010 meliputi: (1) tidak terserapnya anggaran sesuai target optimal (100%) antara lain karena terjadinya perubahan pembayaran honorarium dan BOP THL-TBPP dari semula 10 bulan menjadi 5,5 bulan, adanya penyuluh PNS yang beralih fungsi ke struktural dan THLTBPP menjadi PNS, adanya penyuluh PNS dan THL-TBPP yang mengundurkan diri atau meninggal, adanya kegiatan dan anggaran yang pelaksanaannya sangat berkaitan dengan kewenangan instansi lain seperti DPR dan Kementerian Pertanian (LM3 dan PUAP); (2) belum mantapnya kelembagaan pendidikan pertanian, khususnya SPP dan STPP; (3) belum sempurnanya dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan dan anggaran (TOR, RAB, dan lain-lain) sehingga menghambat proses pelaksanaan kegiatan dan realisasi serapan anggaran; (4) pembinaan manajemen di lingkup BPPSDMP belum optimal; (5) penyelesaian administrasi keuangan kegiatan tidak segera diselesaikan bersamaan dengan selesainya pelaksanaan kegiatan sehingga sering mengakibatkan terlambatnya penyelesaian administrasi keuangan; (6) terbatasnya pengelola keuangan, terutama pada Satker Dekonsentrasi dan Satker Tugas Pembantuan, baik secara kuantitas maupun kualitas; (7) pengelola Satker Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan lebih memprioritaskan pelaksanaan kegiatan dengan sumber dana dari APBD; serta (8) sering terjadinya pergantian pejabat KPA/PPK pada Satker Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ditengah tahun berjalan sehingga menghambat proses administrasi keuangan.

Menyikapi kondisi permasalahan yang masih terjadi di tahun 2010 tersebut, maka langkah antisipasi yang harus dilakukan untuk tahun-tahun mendatang adalah: (1) segera menyusun jadwal palang kegiatan dan serapan anggaran secara lebih cermat setelah DIPA terbit; (2) menyempurnakan mekanisme dan tata hubungan kerja antar unit kerja terkait dalam rangka mempercepat pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan; (3) segera menyempurnakan dokumen pendukung sesuai perkembangan yang terjadi; (4) meningkatkan intensitas dan kualitas pembinaan manajemen di lingkup BPPSDMP; (5) penyelesaian administrasi keuangan secara tepat waktu sesuai target yang telah ditetapkan; (6) menerapkan sistem *reward and punishment* yang tegas kepada seluruh Satker berdasarkan indikator kinerja yang jelas; (7) meminta agar pergantian pejabat KPA/PPK pada Satker lingkup BPPSDMP tidak dilakukan pada saat kegiatan telah berjalan, kecuali diluar batas kemampuan.



BAB IV PENUTUP

Laporan akuntabilitas kinerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) tahun 2010 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan tugas fungsi yang diemban BPPSDMP pada tahun 2010. Pada tahun 2010, sasaran strategis BPPSDMP terangkum kedalam 3 sasaran dengan 70 indikator kinerja yang dipayungi 4 program (peningkatan kesejahteraan petani, penerapan kepemimpinan yang baik, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi).

Kinerja sasaran strategis BPPSDMP pada tahun 2010 secara global mencapai 102,48% dengan kisaran 0%-530,67%. Sedangkan realisasi serapan anggaran mencapai 87,41%, atau sebesar Rp. 1.090.519.431.208 dari total pagu anggaran Rp. 1.247.591.158.000. Hasil analisis efisiensi capaian indikator kinerja BPPSDMP pada tahun 2010 menunjukkan nilai yang efisien atau lebih besar dari 1, yaitu 1,17. Disisi lain capaian realisasi serapan anggaran BPPSDMP pada tahun 2010 sebesar 87,41% merupakan yang tertinggi selama 6 tahun terakhir.

Beberapa permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan BPPSDMP pada tahun 2010 adalah tidak terserapnya anggaran sesuai target optimal, belum mantapnya kelembagaan pendidikan pertanian, belum sempurnanya dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan dan anggaran, pembinaan manajemen yang belum optimal, terlambatnya penyelesaian administrasi keuangan, terbatasnya kuantitas maupun kualitas pengelola keuangan Satker Dekon/TP sehingga lebih memprioritaskan kegiatan APBD serta sering terjadinya pergantian pejabat KPA/PPK pada Satker Dekon/TP. Menyikapi kondisi tersebut, maka langkah antisipasi yang harus dilakukan untuk tahun mendatang adalah: segera menyusun jadwal palang secara lebih cermat setelah DIPA terbit, menyempurnakan mekanisme dan tata hubungan kerja antar unit kerja terkait guna mempercepat penyelesaian kegiatan, menyempurnakan dokumen pendukung sesuai perkembangan yang terjadi, meningkatkan intensitas dan kualitas pembinaan di lingkup BPPSDMP, penyelesaian administrasi keuangan secara tepat waktu, penerapan sistem *reward and punishment* yang tegas, dan meminta agar pergantian pejabat KPA/PPK pada Satker lingkup BPPSDMP tidak dilakukan pada saat kegiatan telah berjalan.

LAMPIRAN

Rencana Strategik Tahun 2010 - 2014

- Instansi** : Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP)
- Visi** : Terwujudnya sumberdaya manusia pertanian yang profesional, kreatif, inovatif dan berwawasan global dalam rangka meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah, ekspor dan kesejahteraan petani
- Misi** :
1. Mengembangkan sistem penyuluhan pertanian yang komprehensif dan terpadu
 2. Mengembangkan sistem pelatihan pertanian yang berbasis kompetensi kerja
 3. Mengembangkan pendidikan, standardisasi dan sertifikasi profesi SDM pertanian yang kredibel
 4. Mengembangkan sistem administrasi manajemen yang transparan dan akuntabel

Tujuan	Sasaran		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		Ket.
	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
1. Meningkatkan kompetensi dan kemandirian petani dalam rangka peningkatan produktivitas petani, usaha tani dan pendapatan	1. Meningkatnya kapasitas non-aparatur pertanian (pelaku utama dan pelaku usaha pertanian)	1. Termanaatkannya 10.000 petani sukses menjadi Penyuluh Swadaya	1 Penataan kelembagaan petani	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	
		2. Ditetapkannya setiap tahun, Programa Penyuluhan Pertanian Nasional dan rencana kegiatan yang mendukung 4 Sukses Pembangunan Pertanian, antisipatif terhadap perubahan terhadap perubahan iklim dan kelestarian lingkungan hidup serta responsif gender (5 Programa PP Nasional dan 5 Rencana Kegiatan Tahunan).	2. Penguatan & pengembangan P4S		
		3. Terselenggaranya penyuluhan yang dikelola petani di 68 kab. dan 18 provinsi sasaran FEATI	3. Penataan serta peningkatan jumlah dan kompetensi penyuluh pertanian mulai dari tingkat Desa s/d tingkat Pusat		
		4. Terselenggaranya pemberdayaan pedesaan & pembangunan pertanian di 150 Desa, 5 Kabupaten dan 1 Provinsi lokasi READ	4. Penumbuhan wirausaha muda dibidang agribisnis melalui <i>agri-training camp</i> , magang, pelatihan kewirausahaan pertanian dan pendidikan menengah kejuruan pertanian		
		5. Meningkatnya kompetensi 97.814 orang non-aparatur melalui pelatihan dan permagangan pertanian yang mendukung 4 Sukses Pembangunan Pertanian, mengantisipasi perubahan iklim dan kelestarian lingkungan hidup, serta responsif gender			

Tujuan	Sasaran		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		Ket.
	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
	2. Bertumbuhkembangnya kelembagaan petani (Gapoktan, P4S, Asosiasi)	1. Terfasilitasinya penumbuhan 20.000 Gapoktan dan 300 Kelembagaan Ekonomi Petani	1 Penataan kelembagaan petani	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	
		2. Tertata dan terklasifikasinya 708 kelembagaan P4S	2. Penguatan & pengembangan P4S		
		3. Terpetakannya spesialisasi dan meningkatnya kompetensi 2.100 Instruktur P4S			
2. Meningkatkan kompetensi kerja aparatur pertanian	3. Meningkatnya kompetensi aparatur pertanian	1. Terselesainya 5 Peraturan Presiden dan 3 Peraturan Menteri Pertanian yang berkaitan dengan penyuluhan dan pemberdayaan petani	1. Penataan serta peningkatan jumlah dan kompetensi penyuluh pertanian mulai dari tingkat Desa s/d tingkat Pusat	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	
		2. Terfasilitasinya pembentukan 19 Bakorluh, 200 Bapelluh, 500 Balai Penyuluhan Kecamatan, 522 BPP Model dan 28.304 Pos Penyuluhan Desa/kelurahan	2. Penataan kelembagaan penyuluhan pertanian		
		3. Terfasilitasinya 27.922 Penyuluh Pertanian PNS dan 24.608 THL-TBPP	3. Pengembangan Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian (SIMLUH-TAN) yang mendukung		
		4. Terselesainya 1.237 Penyuluh Honorer menjadi PNS dan THL-TBPP menjadi Pegawai Tidak Tetap	4 Sukses Pemb.Pert.,		
		5. Tersedianya dokumen data dan informasi mutakhir tentang kelembagaan penyuluhan, kelembagaan petani, ketenagaan Penyuluh PNS dan Penyuluh Swadaya (5 Dokumen Datin kelembagaan penyuluhan, 5 Dokumen Datin kelembagaan petani, 5 Dokumen Datin Penyuluh PNS, 5 Dokumen Datin Penyuluh Swadaya)	antisipasi perubahan iklim, kelestarian lingkungan dan responsif gender		
		6. Tersedianya 1 sistem informasi dan materi penyuluhan 7 sub sektor melalui <i>cyber extension</i>	4. Penataan dan pengembangan kelembagaan		
		7. Meningkatnya eselonering 2 UPT Pelatihan Pusat, dan penataan 10 UPT Pelatihan Pusat serta 19 UPT Pelatihan Daerah	pelatihan pertanian untuk meningkatkan kompetensi dalam rangka mendukung program		
		8. Terstandarisasinya sarana prasarana di UPT pelatihan pertanian	pembangunan pertanian dan reformasi birokrasi		
		9. Terstandarisasinya, terpetakannya dan meningkatnya profesionalisme 290 Widyaiswara dan 790 tenaga teknis kediklatan			

Tujuan	Sasaran		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		Ket.
	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
		10. Terbitnya 21 Pedoman dan Materi Pelatihan mendukung 4 Sukses Pembangunan Pertanian, mengantisipasi perubahan iklim, dan kelestarian lingkungan hidup, serta reformasi birokrasi			
		11. Meningkatnya kompetensi 108.825 orang aparatur pertanian yang mendukung reformasi birokrasi, 4 Sukses Pembangunan Pertanian, mengantisipasi perubahan iklim dan kelestarian lingkungan hidup, serta responsif gender			
		12. Ditetapkannya 14 Program Pelatihan Terintegrasi/Sinkron dengan Program Instansi terkait			
		13. Terasilinasinya 300 orang peserta dalam program kerjasama pelatihan internasional			
3 Menghasilkan aparatur dan non-aparatur pertanian kompeten serta sistem standarisasi dan sertifikasi profesi SDM pertanian yang kredibel	4. Meningkatnya kapasitas dan kompetensi aparatur dan non-aparatur pertanian	1. Berkembangnya kelembagaan 6 STPP dan 6 Program Studi di STPP 2. Bertambahnya 5 Program Studi RIHP Non-Penyuluhan dan 1 Program Studi Perkarantinaan di STPP 3. Meningkatnya status kelembagaan 10 SMK- SPP menjadi Rintisan SMK-SPP Bertaraf Internasional (RSBI) dan SMK-SPP Bertaraf Internasional (SBI) 4. Meningkatnya profesionalisme 600 Guru dan 100 Tenaga Kependidikan di SMK-SPP RSBI/SBI 5. Meningkatnya profesionalisme 210 orang dosen dan 50 kependidikan di STPP 6. Tersedianya 15.000 orang lulusan SMK-SPP yang kompeten sebagai tenaga teknis menengah dan calon wirausahawan muda pertanian 7. Tersedianya 2.460 Sarjana Sain Terapan bidang penyuluhan pertanian dan RIHP Non-Penyuluh Pertanian serta Perkarantinaan Pertanian 8. Terealisasi tugas belajar pasca sarjana bagi 250 aparatur	1. Penumbuhan wirausaha muda dibidang agribisnis melalui <i>agri-training camp</i> , magang, pelatihan kewirausahaan pertanian dan pendidikan menengah kejuruan pertanian 2. Restrukturisasi kelembagaan dan pengembangan program studi pendidikan tinggi pertanian kedinasan 3. Pengembangan SKK-NI untuk komoditas unggulan dalam rangka mendukung daya saing dan nilai tambah	- Program Pendidikan Tinggi, - Program Pendidikan Menengah - Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	

Tujuan	Sasaran		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		Ket.
	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
		9. Terfasilitasinya 150 alumni SMK-SPP mengikuti Program <i>Sister School</i> dan Magang, serta 15 siswa SMK-SPP mengikuti pertukaran siswa dalam rangka kerjasama teknis luar negeri	4. Pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bidang penyuluhan, teknis dan kewirausahaan agribisnis		
		10. Terbentuknya 6 Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bidang pertanian			
		11. Tersedianya 300 orang Assessor, Verifikator, dan Perumus Standar Kompetensi			
		12. Terakreditasinya 7 UPT Pelatihan Pertanian menjadi Diklat Profesi (LDP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUK).			
		13. Tersedianya 5.000 Penyuluh Pertanian yang memiliki Sertifikat Profesi			
		14. Terbitnya 30 Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan)			
4. Meningkatkan pelayanan dan tatakelola administrasi dan manajemen yang efektif dan efisien	5. Meningkatnya kepuasan pelayanan birokrasi serta tersusunnya laporan kinerja dan keuangan yang akuntabel berstatus Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	1. Tertata dan berkembangnya organisasi dan kelembagaan BPPSDMP di Pusat dan 20 UPT 2. Terstrukturisasinya program dan anggaran berbasis kinerja serta terselesaikannya dokumen perencanaan dan kerjasama 130 Satker lingkup BPPSDMP 3. Terwujudnya revitalisasi pengelolaan anggaran/keuangan dan barang milik negara (BMN) pada 130 Satker lingkup BPPSDMP dalam mendukung terwujudnya pelaporan keuangan yang akuntabel dan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 4. Terwujudnya optimalisasi pelaksanaan pengendalian, movev, dan pelaporan pada 130 Satker lingkup BPPSDMP 5. Meningkatnya efektivitas kehumasan dan ketatausahaan pada Satker Pusat dan 20 UPT dalam rangka peningkatan citra BPPSDMP	1. Pemantapan dan pengembangan tata kelola administrasi dan manajemen penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	

**JUMLAH PEGAWAI BPPSDMP TAHUN 2010 MENURUT PENDIDIKAN
(PER 31 DESEMBER 2010)**

NO.	UNIT KERJA	PENDIDIKAN							
		S3	S2	S1/D4	S0 (D1-D3/SM)	SLTA	SLTP	SD	TOTAL
1	Sekretariat BPPSDMP	3	25	61	14	72	9	15	199
2	Pusluhtan	3	27	36	1	18	0	1	86
3	Puslattan	2	13	24	2	11	1	0	53
4	Pusdiktan SSPP	1	15	19	2	15	1	0	53
5	PPMKP Ciawi	3	23	41	6	88	20	50	231
6	BBPKH Cinagara	0	20	23	5	25	3	7	83
7	BBPP Lembang	1	25	48	8	42	5	3	132
8	BBPP Ketindan	1	14	34	8	24	7	7	95
9	BBPP Batu	3	11	22	6	26	0	18	86
10	BBPP Binuang	0	5	29	0	26	4	6	70
11	BBPP Kupang	0	5	34	4	30	1	4	78
12	BBPP Batangkaluku	0	9	29	4	31	7	11	91
13	STPP Medang	0	20	26	7	29	0	2	84
14	STPP Bogor	4	23	53	7	48	12	24	171
15	STPP Magelang	6	45	66	18	70	14	12	231
16	STPP Malang	8	27	60	12	43	9	15	174
17	STPP Gowa	4	24	39	7	33	1	0	108
18	STPP Manokwari	2	14	27	5	17	2	12	79
19	BBPP Jambi	0	13	32	2	34	4	3	88
20	BBPP Lampung	0	2	27	4	22	5	3	63
21	SPP Sembawa Sumsel	1	6	34	4	35	3	5	88
22	SPP Banjarbaru Kalsel	0	6	21	1	25	4	2	59
23	SPP Kupang NTT	0	6	22	2	25	4	4	63
TOTAL		42	378	807	129	789	116	204	2.465

**JUMLAH PEGAWAI BPPSDMP TAHUN 2010 MENURUT GOLONGAN
(PER 31 DESEMBER 2010)**

NO.	UNIT KERJA	GOLONGAN				
		I	II	III	IV	TOTAL
1	Sekretariat BPPSDMP	5	61	109	24	199
2	Pusluhtan	0	14	41	31	86
3	Puslattan	0	4	36	13	53
4	Pusdiktan SSPP	0	8	31	14	53
5	PPMKP Ciawi	58	75	69	29	231
6	BBPKH Cinagara	7	24	35	17	83
7	BBPP Lembang	3	44	62	23	132
8	BBPP Ketindan	4	35	46	10	95
9	BBPP Batu	11	27	36	12	86
10	BBPP Binuang	8	16	34	12	70
11	BBPP Kupang	4	26	39	9	78
12	BBPP Batangkaluku	11	31	38	11	91
13	STPP Medang	1	29	42	12	84
14	STPP Bogor	27	43	83	18	171
15	STPP Magelang	16	77	113	25	231
16	STPP Malang	21	47	82	24	174
17	STPP Gowa	1	31	61	15	108
18	STPP Manokwari	15	23	37	4	79
19	BBPP Jambi	6	31	45	6	88
20	BBPP Lampung	8	18	26	11	63
21	SPP Sembawa Sumsel	5	32	38	13	88
22	SPP Banjarbaru Kalsel	3	17	30	9	59
23	SPP Kupang NTT	6	21	35	1	63
TOTAL		220	734	1168	343	2.465